

**PENGARUH PENDAPATAN DAERAH
TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI
DENGAN BELANJA MODAL SEBAGAI VARIABEL MEDIASI**

Guntur Hendriwiyanto

Email: hendri.karang.juwet@gmail.com

Dosen Pembimbing : Drs. Nurkholis, M.Buss., Ak., Ph.D.

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang

Abstract

The objective of this research was to analyze the effect of capital expenditure in mediating the relationship between Regional Generated Revenues (PAD), General Allocation Fund (DAU), Specific Allocation Fund (DAK), and the Revenue Sharing Fund (DBH) to the economic growth as measured by the Regional Gross Domestic Product (PDRB). Secondary data of those variables were collected from 38 regency/municipality in East Java Province for the period of 2010 to 2012.

This research is quantitative descriptive with multiple regression analysis method. The results of the research showed that simultaneously PAD, DAU, DAK, and DBH had positive and significant effect on economic growth. Partially, PAD, DAU, and DBH had positive and significant effect on economic growth while DAK had negative and significant effect on economic growth. Furthermore, the research showed that capital expenditure did not mediate the relationship between PAD, DAU, DAK, or DBH to economic growth.

Keywords : Regional Generated Revenues, General Allocation Fund, Specific Allocation Fund, Revenue Sharing Fund, Capital Expenditure, Economic Growth.

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh belanja modal dalam memediasi hubungan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Data sekunder atas variabel-variabel tersebut berasal dari 38 pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur untuk periode tahun 2010-2012.

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode analisa regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan PAD, DAU, DAK, dan DBH berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Secara parsial PAD, DAU, dan DBH berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sementara DAK berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil pengujian lebih lanjut menunjukkan bahwa belanja modal tidak memediasi hubungan antara PAD, DAU, DAK, ataupun DBH terhadap pertumbuhan ekonomi.

Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi.

PENDAHULUAN

Dengan terjadinya perubahan pola pengelolaan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dari sentralisasi menjadi desentralisasi menyebabkan pemerintah daerah berubah menjadi daerah otonom. Hal tersebut diikuti dengan penyerahan sebagian kewenangan meliputi tugas dan fungsi dari pemerintah pusat kepada daerah sehingga daerah membutuhkan pendanaan lebih yang berimplikasi pada kebutuhan akan transfer dana berupa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang diarahkan sebagai pendamping bersamaan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk kegiatan pembangunan ekonomi.

Meskipun telah terjadi pelimpahan kewenangan kepada daerah otonom, pemerintah pusat tetap berkewajiban untuk melakukan kontrol atas pertumbuhan dan kesejahteraan daerah yang secara agregat berpengaruh kepada perekonomian nasional. Salah satu indikator perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat berupa besaran pendapatan nasional yang dapat dihitung dengan pendekatan pengeluaran yang menjelaskan bahwa pendapatan nasional merupakan model matematika sebagai berikut

$$Y = C + I + G + (X - M)$$

Mengacu pada model tersebut, perekonomian diharapkan tumbuh seiring dengan meningkatnya dana perimbangan sebagai komponen pengeluaran ("G") pemerintah pusat kepada daerah. Akan tetapi linearitas antara akumulasi dana (PAD dan dana grant) terhadap pertumbuhan ekonomi akan tercapai manakala daerah bertindak bijak dan seksama dalam merencanakan dan mengalokasikan dana yang ada untuk proyek-proyek pembangunan ekonomi sebagai katalis munculnya dan meningkatnya aktivitas perekonomian di daerah.

Hal ini dilaksanakan dengan cara meningkatkan belanja langsung serta mengurangi belanja tidak langsung yang tidak berkontribusi langsung kepada kesejahteraan masyarakat. Ironisnya (Yudhoyono, 2011) menemukan bahwa pengelolaan APBD di berbagai daerah masih belum efektif. Hal itu antara lain ditunjukkan oleh alokasi belanja pegawai yang terus meningkat, sebaliknya porsi belanja modal untuk pembangunan daerah justru menurun. Peningkatan porsi belanja pegawai dalam APBD berkaitan erat dengan terjadinya penambahan dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil baru daerah setiap tahun, yang dalam banyak kasus, tidak sesuai dengan kompetensi dan keperluannya. Yang lebih memprihatinkan, sebagian belanja modal juga digunakan untuk pembangunan rumah dinas, pengadaan mobil dinas, dan pembelanjaan lain yang tidak tepat. Seharusnya, belanja modal digunakan untuk pembangunan infrastruktur, misalnya jalan dan jembatan, yang justru perlu ditingkatkan.

Tak diragukan lagi, infrastruktur memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sektor ini menjadi fondasi bagi pembangunan ekonomi selanjutnya. Keberadaan infrastruktur yang memadai sangat diperlukan untuk menopang pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, lebih merata dan lebih mensejahterakan masyarakat.

Keterbatasan pembangunan infrastruktur menyebabkan melambatnya laju investasi di Tanah Air dalam beberapa tahun terakhir ini. Di sisi lain, harus diakui infrastruktur di Indonesia masih belum bisa meningkatkan daya saing sektor riil. (Nurjoni, 2008).

Dengan program peningkatan belanja modal, mau tak mau menyentuh langsung peningkatan pembangunan beragam infrastruktur, seperti sarana pertanian, transportasi, dan infrastruktur lain yang langsung menopang produktivitas dan kesejahteraan rakyat. Karena anggaran infrastruktur, sektor pertanian, kesehatan dan transportasi akan dilipatgandakan, biaya operasional, perjalanan dinas, atau pun belanja modal yang tidak produktif harus diturunkan. Itu berarti para birokrat tidak bisa lagi seenaknya bermain-main dengan belanja operasional atau mencatut perjalanan dinas (Anasmen, 2009 dalam Produktivitas dan Anggaran, 2007). Selanjutnya anggaran aparat versus anggaran publik harus dirumuskan secara tepat sehingga tidak terjadi "gemuk di aparat, tetapi kurus di publik" (Tarmidzi, 2014). Oleh karena itu, tuntutan merubah struktur belanja menjadi kuat, khususnya pada daerah-daerah yang mengalami kapasitas fiskal rendah (Halim, 2001 dalam Adi, 2006).

Strategi alokasi anggaran pembangunan ini pada gilirannya mampu mendorong dan mempercepat pembangunan ekonomi nasional, sekaligus menjadi alat untuk mengurangi disparitas regional (Madjidi, 1997 dalam Adi, 2006). Selanjutnya alokasi anggaran pembangunan yang terencana dan lebih berpihak kepada publik tersebut diharapkan akan menjadi mediasi/perantara terciptanya linearitas antara semangat pemerintah daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerahnya sebagai pembiayaan (*financing*) belanja publik dengan harapan tercapainya kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang optimal.

Penelitian dengan memposisikan belanja modal sebagai variabel mediasi antara lain dilakukan oleh Walidi (2009) yang menyimpulkan bahwa belanja modal positif memediasi hubungan antara DAU dengan pendapatan per kapita. Muis (2011) melaporkan bahwa belanja modal dapat secara positif memediasi hubungan antara DAU dan DAK dengan pertumbuhan ekonomi. Temuan yang berbeda diungkapkan oleh Uhise (2013) yang menemukan bahwa belanja modal negatif memediasi hubungan antara DAU dengan pertumbuhan ekonomi. Kesimpulan serupa dengan Uhise juga diungkapkan oleh Afriani *et all.*(2012) bahwa belanja modal tidak memediasi hubungan antara PAD dan DAU dengan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan Amnah (2014) menyimpulkan bahwa belanja modal memediasi hubungan antara PAD dengan pertumbuhan ekonomi tetapi tetap sejalan dengan Afriani (2012) dan Uhise (2013) dalam menyimpulkan bahwa hubungan antara DAU dan DAK dengan pertumbuhan ekonomi tidak dimediasi oleh belanja modal.

Dari berbagai hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa sifat mediasi belanja modal dalam hubungan antara pendapatan daerah dengan pertumbuhan ekonomi menunjukkan hasil positif dan negatif. Selain itu pada penelitian terdahulu belum mengikutsertakan variabel Dana Bagi Hasil (DBH) dalam model empiris penelitiannya. Meskipun nilai DBH jauh lebih kecil dari DAU akan tetapi besarnya hampir dua kali lipat nilai DAK.

Disamping belum konklusifnya temuan hasil penelitian tentang sifat mediasi belanja modal, penelitian terkait akuntansi keuangan sektor publik selama ini hanya menitikberatkan pada pembahasan teknis akuntansi keuangan dan alokasi anggaran tanpa adanya pembahasan lebih lanjut mengenai dampak/outcome dari alokasi anggaran. Lingkup anggaran menjadi relevan dan penting di lingkungan pemerintah daerah karena terkait dengan dampak anggaran terhadap kinerja pemerintah, sehubungan dengan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat (Muis, 2012). Salah satu cara untuk mengukur kinerja yaitu melalui angka capaian pertumbuhan ekonomi sebagai indikator yang sangat penting untuk mengetahui dan mengevaluasi hasil pembangunan. Adanya data pertumbuhan ekonomi akan menunjukkan sejauh mana kinerja pemerintah dalam menghasilkan nilai tambah atau pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Pertumbuhan yang positif menunjukkan adanya peningkatan kinerja dan sebaliknya bila negatif berarti terjadi penurunan kinerja (Amnah, 2014).

Perbedaan nilai PAD dan dana perimbangan antar daerah memiliki dampak yang berbeda pula pada pertumbuhan ekonominya. Salah satu cara untuk mengukur pertumbuhan ekonomi yaitu melalui capaian nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Berdasarkan data PDRB provinsi seluruh Indonesia untuk tahun 2010-2012 diketahui bahwa PDRB tertinggi dicapai oleh Provinsi DKI Jakarta menyusul Jawa Timur dan Jawa Barat. Posisi teratas nilai PDRB yang dicapai oleh DKI Jakarta sangatlah wajar mengingat kedudukan DKI Jakarta juga sebagai ibu kota negara. Hal ini berbeda dengan Provinsi Jawa Timur yang bukan merupakan ibu kota negara melainkan hanya sebatas provinsi sebagaimana provinsi umumnya di Indonesia. Hal inilah yang melandasi pemilihan Provinsi Jawa Timur sebagai objek penelitian oleh penulis, karena dianggap akan cukup merepresentasikan provinsi pada umumnya di Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas peneliti terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul "PENGARUH PENDAPATAN DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DENGAN BELANJA MODAL SEBAGAI VARIABEL MEDIASI".

TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Pertumbuhan ekonomi dapat dijadikan sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi diukur dengan menggunakan PDRB (Bapenas, 2003 dalam Harianto dan Adi, 2007). PDRB secara nyata mampu memberikan gambaran mengenai nilai tambah bruto yang dihasilkan unit-unit produksi pada suatu daerah dalam periode tertentu. Lebih jauh, perkembangan besaran nilai PDRB merupakan salah satu indikator yang dapat dijadikan ukuran untuk menilai keberhasilan pembangunan suatu daerah, atau dengan kata lain pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat tercermin melalui pertumbuhan nilai PDRB (Bappeda Pekanbaru, 2014).

Terdapat dua macam harga yang digunakan sebagai dasar perhitungan PDRB yaitu atas dasar harga berlaku (ADHB) dan atas dasar harga konstan (ADHK). Tingkat pertumbuhan ekonomi dihitung dengan cara membandingkan PDRB tahun tertentu dengan tahun sebelumnya berdasarkan ADHK.

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan". Selanjutnya, mengacu pada pasal 6 UU No.33 Tahun 2004, PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU No.33 Tahun 2004 dan PP No.55 Tahun 2005). Dana perimbangan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan antar-Pemerintah Daerah (Pasal 3 ayat (2) UU No. 33 Tahun 2004). Dana perimbangan terdiri dari tiga jenis yaitu

Pertama, Dana Bagi Hasil yaitu dana yang bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Dana bagi hasil yang bersumber dari pajak terdiri atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21. Dana bagi hasil yang bersumber dari sumber daya alam berasal dari kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, pertambangan panas bumi

Kedua, Dana Alokasi Umum yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU No. 33 Tahun 2004 pasal 1 angka 21).

Ketiga, Dana Alokasi Khusus yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (UU No. 33 Tahun 2004 pasal 1 angka 23).

Belanja Modal

Berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 pasal 53 ayat (1), belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Pengaruh PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Semakin tinggi PAD suatu daerah, maka tingkat ketergantungan fiskal daerah tersebut kepada pusat semakin berkurang. Selanjutnya daerah lebih leluasa dan fleksibel dalam merencanakan alokasi anggaran sesuai dengan agenda ekonominya. Melalui belanja rutin, belanja pembangunan/infrastruktur, ataupun belanja lainnya, PAD sebagai sumber pembiayaan daerah diharapkan mampu menciptakan sejumlah aktivitas ekonomi baru dalam masyarakat.

Dengan meningkatnya aktivitas ekonomi pada masyarakat, akan terjadi peningkatan jumlah output barang dan/ atau jasa yang diikuti pula dengan meningkatnya jumlah uang beredar dari segi pembelanjaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Selanjutnya hal tersebut akan meningkatkan nilai PDRB dan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Penelitian oleh Brata (2004) menemukan bahwa PAD berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini terjadi karena daerah lebih leluasa dalam memanfaatkan PAD sesuai dengan agenda pembangunan ekonominya. Akan tetapi hubungan antara PAD dan pertumbuhan ekonomi tersebut dapat mengarah ke hubungan negatif jika daerah terlalu ofensif dalam upaya meningkatkan penerimaan daerahnya. Sebagaimana diketahui, belakangan ini banyak pihak, khususnya dunia usaha, yang mengeluhkan soal begitu banyaknya pajak dan/atau retribusi yang justru menekan daya saing daerah.

Kesimpulan serupa juga diungkapkan oleh Gunantara dan Dwirandra (2014). Keduanya menyimpulkan bahwa dengan meningkatnya PAD, daerah menjadi lebih mampu dalam memberikan fasilitas pelayanan publik yang lebih baik untuk masyarakat lokal. Selanjutnya ketersediaan infrastruktur publik tersebut akan menjadi kunci dari pertumbuhan ekonomi yang beriringan dengan meningkatnya produktivitas.

Berdasarkan uraian diatas penelitian terdahulu, hipotesis yang diajukan adalah

H₁ : PAD berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Pengaruh DAU terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Modal dasar desentralisasi fiskal seharusnya berasal dari PAD. Tetapi nyatanya, PAD hanya mampu membiayai belanja pemerintah daerah paling tinggi sebesar 20% (Kuncoro, 2004 dalam Santosa, 2013). Sehingga untuk mengatasi kekurangan tersebut, pemerintah pusat memberikan dana alokasi umum (DAU).

Pemanfaatan DAU diserahkan sepenuhnya kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah. Fleksibilitas dalam pemanfaatan DAU baik melalui belanja rutin, pembangunan/ infrastruktur/ modal, ataupun belanja lainnya diharapkan akan memunculkan pelaku-pelaku ekonomi baru dalam masyarakat.

Penelitian oleh Maryati dan Endrawati (2010) menyimpulkan bahwa DAU berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. DAU berperan sangat signifikan karena belanja daerah lebih didominasi dari jumlah DAU. Setiap DAU yang diterima pemerintah daerah akan ditujukan untuk belanja pemerintah daerah, salah satunya adalah belanja modal. Hal ini tidak jauh berbeda dengan peran PAD sebagai sumber pembiayaan bagi pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur yang akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah.

Penelitian lainnya oleh Taaha *et al.*(2009) menemukan hubungan positif dan signifikan antara DAU dengan pertumbuhan ekonomi. Alokasi DAU sebagai sumber pembiayaan infrastruktur berupa sarana dan prasarana ekonomi akan menunjang kegiatan produksi barang dan jasa oleh investor baik dari masyarakat setempat ataupun dari luar daerah yang bersangkutan. Dengan munculnya kegiatan investasi selanjutnya akan menciptakan kesempatan kerja, dan menciptakan *multiple effect* sehingga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan uraian diatas penelitian terdahulu, hipotesis yang diajukan adalah

H₂ : DAU berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Pengaruh DAK terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Pengalokasian DAK lebih difokuskan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang, dan tidak termasuk penyertaan modal. Berbeda

dengan DAU, pemanfaatan DAK oleh daerah tidaklah fleksibel dan leluasa tetapi harus mengikuti berbagai regulasi dari pemerintah pusat.

Dengan fokus alokasi kepada belanja fisik sarana dan prasarana infrastruktur, aset tetap hasil belanja DAK akan menjadi modal dasar bagi masyarakat di daerah dalam melaksanakan aktivitas-aktivitas ekonomi yang mengarahkan pada peningkatan output dan kesejahteraan masyarakat.

Taaha *et al.*(2009) dan Santosa (2013) menemukan hubungan positif antara DAK dengan pertumbuhan ekonomi dengan penjelasan bahwa alokasi DAK lebih diarahkan pada investasi pembangunan berupa sarana fisik penunjang yang berguna bagi publik masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas penelitian terdahulu, hipotesis yang diajukan adalah

H₃ : DAK berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Pengaruh DBH terhadap Pertumbuhan Ekonomi

DBH dialokasikan berdasarkan prinsip *by origin* dengan penyaluran berdasarkan realisasi penerimaan. Wandira (2013) menyebutkan bahwa DBH merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah selain yang berasal dari PAD, DAU, dan DAK.

Taaha *et al.*(2009) menemukan hubungan positif dan signifikan antara DBH dengan pertumbuhan ekonomi. Alokasi DBH sebagai sumber pembiayaan infrastruktur berupa sarana dan prasarana ekonomi akan menunjang kegiatan produksi barang dan jasa oleh investor baik dari masyarakat setempat ataupun dari luar daerah yang bersangkutan. Dengan munculnya kegiatan investasi selanjutnya akan menciptakan kesempatan kerja, dan menciptakan *multiple effect* sehingga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Pujiati (2008) dan Santosa (2013).

Berdasarkan uraian diatas penelitian terdahulu, hipotesis yang diajukan adalah

H₄ : DBH berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Pengaruh PAD terhadap Belanja Modal

Semakin baik PAD suatu daerah maka semakin besar pula alokasi belanja modalnya (Ardhani, 2011 dalam Wandira, 2013). Hal serupa diungkapkan oleh Brata (2004) bahwa peningkatan PAD dapat meningkatkan investasi belanja modal pemerintah daerah sehingga kualitas pelayanan publik semakin baik.

Penelitian oleh Kusnandar dan Siswantoro (2011) menyimpulkan bahwa PAD sangat berpengaruh terhadap alokasi belanja modal bahkan pada tingkat keyakinan 99% ($\alpha=1\%$). Walaupun persentase PAD cukup kecil dari total pendapatan yang diterima oleh daerah (sekitar 7%) namun sangat berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal. Dengan meningkatnya PAD daerah lebih leluasa dalam merencanakan dan mengalokasikan kegiatan atau pengeluaran berdampak terhadap peningkatan pembangunan daerah terutama pembangunan infrastruktur.

Penelitian lainnya dengan kesimpulan sejenis dilakukan oleh Kartika dan Dwirandra (2014). PAD yang tinggi akan mempengaruhi pembangunan dan perkembangan di daerah yang direalisasikan dalam bentuk pengadaan fasilitas, infrastruktur, dan sarana prasarana yang ditujukan untuk kepentingan publik yang mana semua hal tersebut dialokasikan melalui belanja modal.

Berdasarkan uraian diatas penelitian terdahulu, hipotesis yang diajukan adalah

H₅ : PAD berpengaruh positif terhadap terhadap pengalokasian belanja modal.

Pengaruh DAU terhadap Belanja Modal

Abdullah dan Halim (2004) menyatakan bahwa dana transfer jangka panjang berpengaruh terhadap belanja modal dan pengurangan jumlah dana transfer dapat menyebabkan penurunan dalam pengeluaran belanja modal.

Penelitian oleh Oktriniatmaja (2011) menyimpulkan bahwa DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal daerah. DAU merupakan sumber utama pembiayaan bagi daerah untuk menjaga/menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum di

daerahnya sebagai akibat tidak meratanya kemampuan keuangan dan ekonomi daerah. Penelitian lainnya oleh Masdjojo dan Sukartono (2009) memperkuat basis teori penyusunan anggaran yang bersifat *incrementalism*, yaitu alokasi anggaran belanja akan menyesuaikan dengan bertambah/berkurangnya jumlah anggaran pendapatan daerah.

Berdasarkan uraian diatas penelitian terdahulu, hipotesis yang diajukan adalah
H₆ : DAU berpengaruh positif terhadap terhadap pengalokasian belanja modal.

Pengaruh DAK terhadap Belanja Modal

Secara umum, DAK menyerupai dana inpres (Instruksi Presiden) yang dialokasikan dalam APBN untuk membiayai berbagai kegiatan pembangunan khusus di dan oleh daerah.

Pelaksanaan DAK sendiri diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan/atau perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan masyarakat dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang, dan tidak termasuk penyertaan modal. Sesuai PP No. 55/2005 tentang dana perimbangan, penggunaan DAK dilaksanakan sesuai dengan juknis serta DAK tidak dapat digunakan untuk mendanai administrasi kegiatan, penyiapan kegiatan fisik, penelitian, pelatihan, dan perjalanan dinas. Sehingga alokasi DAK secara khusus hanya diperuntukkan dalam bentuk belanja modal dan bukan jenis belanja lainnya. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian oleh lembaga penelitian SMERU (2008) yang menyatakan bahwa sumber pendanaan untuk belanja modal salah satunya berasal dari DAK.

Penelitian oleh Oktriniatmaja (2011) menyimpulkan bahwa DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal daerah. Hal tersebut tidak lain karena sesuai UU No.33 Tahun 2004 pemanfaatan DAK harus mengikuti rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat antara lain untuk membangun sarana dan prasarana fisik yang tentunya atas kegiatan tersebut dianggarkan melalui belanja modal. Kesimpulan serupa diutarakan oleh Wandira (2013) yang menjelaskan bahwa pendapatan daerah berupa dana perimbangan (transfer daerah) dari pusat menuntut daerah membangun dan mensejahterahkan rakyatnya melalui pengelolaan kekayaan daerah yang proposional dan profesional serta membangun infrastruktur yang berkelanjutan, salah satunya pengalokasian anggaran ke sektor belanja modal.

Berdasarkan uraian diatas penelitian terdahulu, hipotesis yang diajukan adalah
H₇ : DAK berpengaruh positif terhadap terhadap pengalokasian belanja modal.

Pengaruh DBH terhadap Belanja Modal

Wandira (2013) menyebutkan bahwa DBH merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah selain yang berasal dari PAD, DAU dan DAK.

Penelitian oleh Wandira (2013) menyimpulkan bahwa DBH berpengaruh signifikan terhadap belanja modal Hasil ini menjelaskan bahwa daerah dengan realisasi DBH yang besar cenderung memiliki belanja modal yang besar pula. Hasil ini memberikan indikasi kuat bahwa perilaku belanja modal akan sangat dipengaruhi dari sumber penerimaan DBH. Sehingga jika anggaran DBH meningkat maka alokasi belanja modal pun meningkat. Kesimpulan serupa lainnya disampaikan oleh Indra (2010) dan Maryadi (2012).

Berdasarkan uraian diatas penelitian terdahulu, hipotesis yang diajukan adalah
H₈ : DBH berpengaruh positif terhadap terhadap pengalokasian belanja modal.

Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Pengeluaran pemerintah dalam bentuk alokasi belanja modal didasarkan pada kebutuhan sarana dan prasarana baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun fasilitas publik berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Melalui peningkatan belanja modal diharapkan menjadi faktor pendorong timbulnya berbagai investasi baru di daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk kegiatan produksi sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Menurut model Rostow dan Musgrave (Mangkoesebroto, 1997 dalam Hendarmin, 2012) dijelaskan bahwa model belanja modal pemerintah pada tahap awal perkembangan ekonomi dicirikan dengan besarnya persentase investasi pemerintah terhadap total investasi. Hal ini disebabkan karena pemerintah harus menyediakan sarana dan prasarana infrastruktur untuk pendidikan, kesehatan, dan transportasi.

Lebih lanjut, Wagner menyebutkan bahwa dalam suatu perekonomian apabila pendapatan per kapita meningkat, secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat (Mangkoesebroto, 1997 dalam Hendarmin, 2012). Sehingga secara tidak langsung ataupun langsung dalam hal dikehendaki PDB secara agregat atau pendapatan perkapita meningkat harus diikuti dengan meningkatnya nilai pengeluaran pemerintah. Dengan semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi publik terhadap pembangunan (Mardiasmo, 2002 dalam Adi, 2006).

Penelitian oleh Sodik (2007) menyimpulkan adanya pengaruh positif yang signifikan pengeluaran pemerintah baik pengeluaran pembangunan maupun pengeluaran rutin terhadap pertumbuhan ekonomi regional dikarenakan pengeluaran pembangunan sangat diperlukan oleh suatu daerah untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kemampuannya sendiri. Hal ini bersesuaian dengan tahapan perkembangan ekonomi sebagaimana diungkapkan oleh Rostow dan Musgrave. Akan tetapi yang perlu digarisbawahi adalah belanja modal yang dapat mempengaruhi naik/turunnya PDRB adalah belanja pembangunan infrastruktur yang dapat menyentuh langsung pada perekonomian masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas penelitian terdahulu, hipotesis yang diajukan adalah

H₀ : Belanja Modal berpengaruh positif terhadap terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Peran Mediasi Belanja Modal dalam Hubungan antara PAD, DAU, DAK, dan DBH dengan Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi regional menjadi salah satu agenda penting setelah otonomi daerah. Salah satu cara yang ditempuh oleh pemerintah daerah yaitu melalui optimalisasi pendapatan daerah. Akan tetapi kenaikan pendapatan daerah tidak serta merta meningkatkan pertumbuhan ekonomi tanpa diikuti anggaran belanja yang efektif dan efisien dalam bentuk kegiatan-kegiatan produktif yang mengarahkan pada pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Brata (2004) menyimpulkan bahwa PAD serta sumbangan dan bantuan memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sementara DBH dan sisa dana anggaran tahun lalu tidak berpengaruh signifikan. Penelitian lainnya oleh Maryati dan Endrawati (2010) menyimpulkan bahwa PAD, DAU, dan DAK berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Kontradiktif dengan temuan Brata yang menyatakan bahwa DBH tidak berpengaruh signifikan, Santosa (2013) menyimpulkan bahwa DAK dan DBH berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.

Penelitian dengan model empiris sedikit berbeda yaitu dengan menyertakan belanja modal sebagai variabel independen bersama dengan variabel pendapatan daerah dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi antara lain dilakukan oleh Setiyawati dan Hamzah (2007) yang menyimpulkan bahwa PAD dan DAU berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi sementara DAK dan belanja pembangunan tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu, Prasetya (2011) menyimpulkan pula bahwa PAD, DAU, DBH dan belanja modal berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi sementara DAK berpengaruh tidak signifikan dan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

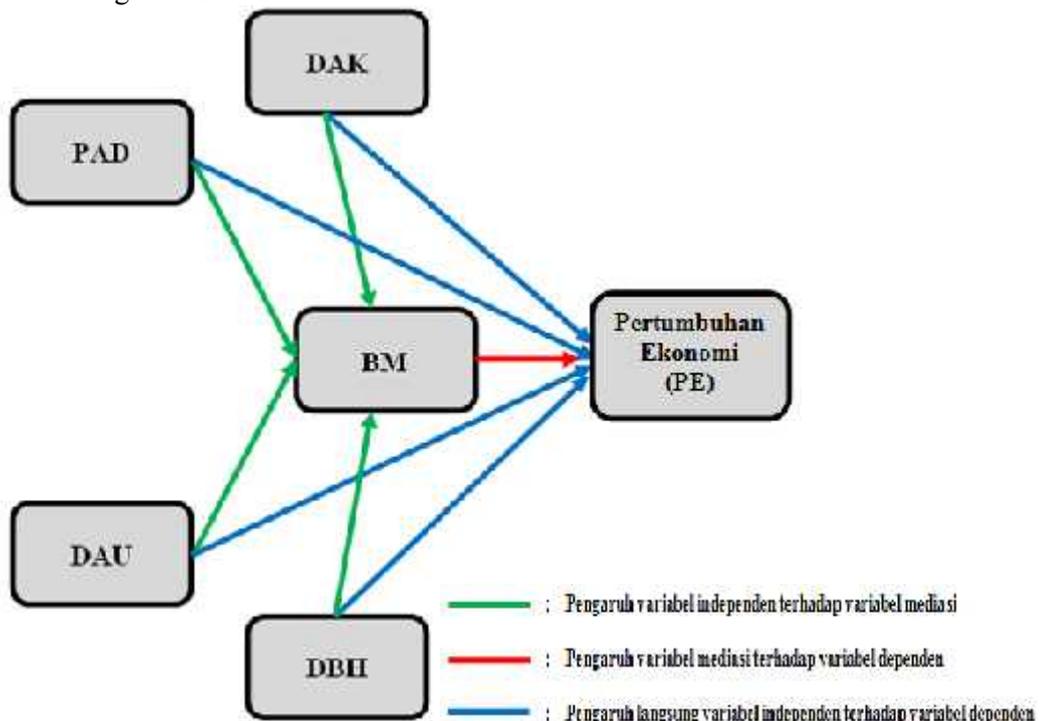
Penelitian dengan model empiris yaitu belanja modal sebagai variabel dependen antara lain oleh Wandira (2013) menyimpulkan bahwa PAD, DAK, dan DBH berpengaruh signifikan terhadap belanja modal sementara DAK berpengaruh signifikan negatif terhadap belanja modal. Penelitian lainnya oleh Maryadi (2012) menyimpulkan bahwa PAD, DAU, dan DBH berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Berdasarkan uraian diatas dan penelitian terdahulu, diketahui bahwa belanja modal mampu bersama-sama dengan variabel pendapatan daerah dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi

akan tetapi disaat yang bersamaan belanja modal juga dipengaruhi oleh variabel pendapatan daerah. Sehingga dapat diduga variabel belanja modal memiliki sifat sebagai variabel mediasi/intervening. Hal ini mengarahkan peneliti pada pengembangan hipotesis berupa

- H₁₀₋₁ : Belanja Modal memediasi hubungan PAD terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
- H₁₀₋₂ : Belanja Modal memediasi hubungan DAU terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
- H₁₀₋₃ : Belanja Modal memediasi hubungan DAK terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
- H₁₀₋₄ : Belanja Modal memediasi hubungan DBH terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Berdasarkan hipotesa yang telah dirumuskan, maka secara umum model penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1 - Model Penelitian

METODE PENELITIAN

Model regresi pada penelitian ini meliputi:

- I $PE = \alpha_1 + \beta_1 PAD + \gamma_1 DAU + \delta_1 DAK + \theta_1 DBH + \varepsilon$ (Model Langsung)
- II $BM = \alpha_3 + \beta_3 PAD + \gamma_3 DAU + \delta_3 DAK + \theta_3 DBH + \varepsilon$ (Model Langsung)
- III $PE = \alpha_2 + \varphi_2 BM + \varepsilon$ (Model Langsung)
- IV $PE = \alpha_4 + \beta_4 PAD + \gamma_4 DAU + \delta_4 DAK + \theta_4 DBH + \varphi_3 BM + \varepsilon$ (Model Mediasi)

Variabel independen dalam penelitian ini adalah PAD, DAU, DAK, dan DBH. Sementara variabel dependennya adalah pertumbuhan ekonomi yang diproksi dengan nilai PDRB sedangkan variabel mediasi yang digunakan yaitu belanja modal (BM).

Uji Variabel Mediasi

Analisis variabel mediasi pada penelitian ini dilakukan dengan metode perbedaan koefisien yang menggunakan metode pemeriksaan dengan melakukan analisis dengan dan tanpa melibatkan variabel mediasi.

Metode perbedaan koefisien dilakukan dengan cara melakukan dua kali analisis, yaitu analisis dengan melibatkan variabel mediasi dan analisis tanpa melibatkan variabel mediasi.

Metode pemeriksaan variabel mediasi dengan pendekatan perbedaan koefisien dilakukan sebagai berikut: (1) memeriksa pengaruh langsung variabel independen terhadap variabel dependen pada model dengan melibatkan variabel mediasi (2) memeriksa pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen pada model tanpa melibatkan variabel mediasi, (3) memeriksa pengaruh variabel independen terhadap variabel mediasi, (4) memeriksa pengaruh variabel mediasi terhadap variabel dependen.

Jika (3) dan (4) signifikan, serta (1) tidak signifikan, maka belanja modal merupakan variabel mediasi sempurna (*complete mediation*). Jika (3) dan (4) signifikan serta (1) juga signifikan, di mana koefisien dari (1) lebih kecil (turun) dari (2) maka belanja modal dikatakan sebagai variabel mediasi sebagian (*partial mediation*). Jika (3) dan (4) signifikan serta (1) juga signifikan, di mana koefisien dari (1) hampir sama dengan (2) maka belanja modal dikatakan bukan sebagai variabel mediasi. Jika salah satu (3) atau (4) atau keduanya tidak signifikan maka belanja modal bukan sebagai variabel mediasi (Solimun, 2011; Hair *et al.*, 2010).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Hasil uji statistik deskriptif menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Jawa Timur selama tiga tahun terakhir masing-masing 6,68 persen (2010), 7,22 persen (2011) dan 7,27 persen (2012). Rata-rata PDRB tertinggi dicapai oleh Kota Surabaya selanjutnya Kabupaten Sidoarjo, Kota Kediri, Kabupaten Gresik, dan Kabupaten Malang. Sementara itu PDRB terendah dicapai oleh Kabupaten Pacitan, Kota Batu, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, dan Kota Blitar.

PAD kabupaten/kota di Jawa Timur bergradien positif dengan laju pertumbuhan diatas 10%. PAD tertinggi dicapai oleh Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, Kabupaten Jember, dan Kabupaten Malang.

Besaran DAU sejak tahun 2010 s.d 2012 mengalami peningkatan. Daerah yang menerima DAU terkecil adalah Kota Mojokerto sementara daerah dengan DAU tertinggi adalah Kabupaten Malang.

Daerah dengan porsi DAK tertinggi adalah Kabupaten Malang sementara daerah dengan porsi DAK terkecil adalah Kota Kediri.

Daerah yang mendapatkan DBH terbesar pada tahun 2012 adalah Kabupaten Bojonegoro mengingat telah beroperasinya ladang minyak blok Cepu. Sementara daerah dengan DBH terkecil adalah Kota Batu, Kota Pasuruan, Kota Blitar, Kota Mojokerto, dan Kota Probolinggo.

Wilayah dengan rata-rata belanja modal terbesar adalah Kota Surabaya dan Kabupaten Malang. Jumlah belanja modal yang cukup besar tersebut jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Jawa Timur cukup wajar mengingat Kota Surabaya dan Kabupaten Malang merupakan pusat perekonomian di Jawa Timur. Sementara itu wilayah yang memiliki rata-rata belanja modal terkecil adalah Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Madiun, Kota Batu, dan Kota Blitar.

Uji Hipotesis

Sebelum melakukan pengujian hipotesis perlu dilakukan uji normalitas untuk mengetahui apakah residual dari model regresi memiliki sebaran yang berdistribusi normal. Hasil uji normalitas dengan uji Jarque Bera (JB) diketahui bahwa Model I dengan $df = 5-1 = 4$ dan $\alpha = 0,05$ didapatkan nilai chi square sebesar 9,488 sementara nilai JB hasil perhitungan sebesar 307,8835; Model II dengan $df = 5-1 = 4$ dan $\alpha = 0,05$ didapatkan nilai chi square sebesar 9,488 sementara nilai JB hasil perhitungan sebesar 168,5467; Model III dengan $df = 2-1 = 1$ dan $\alpha = 0,05$ didapatkan nilai chi square sebesar 3,841 sementara nilai JB hasil perhitungan sebesar 520,1750; dan Model IV dengan $df = 6-1 = 5$ dan $\alpha = 0,05$ didapatkan nilai chi square sebesar 11,070 sementara nilai JB hasil perhitungan sebesar 40,83213. Nilai JB untuk model I s.d IV jauh lebih besar dari nilai chi square masing-masing model sehingga disimpulkan bahwa residual model regresi tidak berdistribusi normal. Untuk mengatasi permasalahan normalitas data tersebut, maka dilakukan transformasi dalam bentuk logaritma natural agar model regresi dapat memenuhi asumsi klasik.

Setelah dilakukan transformasi didapatkan variabel independen yaitu LNPAD, LNDAU, LNDAK, LNDBH dan variabel dependen yaitu LNPDRB sementara variabel mediasi yaitu LNBM. Selanjutnya dilakukan pengujian normalitas termasuk uji asumsi klasik lainnya berupa uji heteroskedastisitas, multikolinearitas, dan autokorelasi. Hasil pengujian menunjukkan bahwa model regresi I s.d IV terbebas dari masalah asumsi klasik.

Tabel 1 - Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

	Model I		Model II		Model III		Model IV	
	Koefisien	t	Koefisien	t	Koefisien	t	Koefisien	t
Konstanta	-1,337	-1,980	0,355	0,535	2,860	4,431	-1,317	-1,942
LNPAD	0,550	8,091*	0,230	3,450*	-	-	0,563	7,840*
LNDAU	1,096	7,281*	0,442	2,992*	-	-	1,121	7,138*
LNDAK	-0,369	-6,718*	-0,017	-0,320	-	-	-0,370	-6,712*
LNDBH	0,432	4,658*	0,199	2,194**	-	-	0,443	4,663*
LNBM	-	-	-	-	1,146	8,964*	-0,056	-0,579
F	158,144*		33,923*		80,367*		125,811*	
R	0,923		0,744		0,646		0,923	
R ²	0,853		0,554		0,417		0,853	
Adj. R ²	0,847		0,538		0,412		0,846	

*Sig pada $\alpha = 0,01$

**Sig pada $\alpha = 0,05$

Sumber : Output Eviews

Berdasarkan tabel 1 dapat disusun persamaan regresi sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{I} \quad \text{LNPDRB} &= -1,337 + 0,55\text{LNPAD} + 1,096\text{LNDAU} - 0,369\text{LNDAK} + 0,432\text{LNDBH} \\
 \text{II} \quad \text{LNBM} &= 0,355 + 0,23\text{LNPAD} + 0,442\text{LNDAU} - 0,017\text{LNDAK} + 0,199\text{LNDBH} \\
 \text{III} \quad \text{LNPDRB} &= 2,86 + 1,146\text{LNBM} \\
 \text{IV} \quad \text{LNPDRB} &= -1,317 + 0,563\text{LNPAD} + 1,121\text{LNDAU} - 0,37\text{LNDAK} + 0,443\text{LNDBH} \\
 &\quad - 0,056\text{LNBM}
 \end{aligned}$$

Nilai R untuk model I sebesar 0,923, model II sebesar 0,744, model III sebesar 0,646, dan model IV sebesar 0,923. Nilai R untuk model I s.d IV cukup besar sehingga menunjukkan bahwa terdapat hubungan/pengaruh cukup kuat antara variabel independen dengan dependen. Sementara itu nilai R² disesuaikan digunakan untuk mengetahui sejauh mana kontribusi variabel independen secara bersama-sama menjelaskan variabel dependennya, dalam hal ini untuk model I sebesar 0,847 atau 84,7%, model II sebesar 0,538 atau 53,8%, model III sebesar 0,412 atau 41,2%, dan model IV sebesar 0,846 atau 84,6%. Sedangkan sisanya sebesar 15,3% untuk model I, 46,2% untuk model II, 58,8% untuk model III, dan 15,4% untuk model IV dijelaskan oleh variabel-variabel lain diluar model penelitian ini.

Nilai F hitung model I sebesar 158,144, model II sebesar 33,923, model III sebesar 80,367, dan model IV sebesar 125,811. Nilai F hitung model I s.d IV signifikan pada $p < 0,01$, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen yang digunakan pada setiap model regresi secara bersama-sama/simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependennya.

Berdasarkan hasil uji t diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, PAD, DAU, dan/ atau DBH berperan dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dengan arah yang positif. Hal ini bermakna bahwa apabila terjadi kenaikan nilai ketiga jenis pendapatan daerah tersebut maka akan menyebabkan peningkatan pula pada capaian pertumbuhan ekonomi. PAD, DAU, dan/ atau DBH yang sangat fleksibel dari segi pemanfaatannya menyebabkan daerah lebih leluasa dalam merencanakan alokasi anggaran belanja untuk kegiatan pembangunan sesuai dengan agenda ekonominya yang antara lain berupa pembangunan sarana dan prasarana dasar yang berperan dalam menunjang pertumbuhan ekonomi yang optimal.

Kedua, DAK berperan dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi akan tetapi dengan arah yang berlawanan. Hal ini bermakna bahwa apabila terjadi kenaikan nilai DAK justru akan menyebabkan penurunan pada capaian pertumbuhan ekonomi. Kesimpulan ini berseberangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Muis (2012) dan Santosa (2013). Adapun penelitian dengan kesimpulan yang serupa dengan hasil penelitian ini dilakukan oleh Maryati dan Endrawati (2010), Rahmadi (2011) dan Afrisa et al.(2012).

Penggunaan DAK sebagai specific grants ditentukan sepenuhnya oleh pemerintah pusat melalui peraturan menteri keuangan. Alokasi DAK berdasarkan peraturan menteri keuangan tentang pedoman umum dan alokasi DAK pada tahun 2010 s.d 2012 sebagian besar dialokasikan untuk infrastruktur pendidikan dan kesehatan seperti pembangunan sekolah, puskesmas, rumah bidan dan lain-lain sementara sisanya tersebar hampir merata untuk berbagai macam bidang. Alokasi DAK untuk kegiatan pembangunan infrastruktur pendidikan dan kesehatan tersebut bisa jadi bukanlah menjadi prioritas pemerintah daerah yang bersangkutan pada tahun berjalan. Negatifnya hubungan antara DAK dengan pertumbuhan ekonomi disebabkan peruntukan DAK yang tidak secara langsung berhubungan dengan faktor-faktor yang secara langsung mendorong pertumbuhan ekonomi seperti infrastruktur jalan dan jembatan.

Selain itu, daerah diwajibkan untuk menyediakan dana pendamping sebesar 10% dari total alokasi DAK. Hal tersebut tentunya akan menggeser sejumlah anggaran belanja dari yang awalnya mungkin direncanakan untuk belanja tertentu khususnya yang diharapkan menopang pertumbuhan ekonomi secara langsung menjadi dana pendamping bagi DAK yang diterima dari pemerintah pusat.

Ketiga, PAD, DAU, dan/ atau DBH berperan dalam mempengaruhi alokasi anggaran belanja modal dengan arah yang positif. Hal ini bermakna bahwa apabila terjadi kenaikan nilai ketiga jenis pendapatan daerah tersebut maka akan menyebabkan peningkatan pula pada alokasi anggaran belanja modalnya. Sebagaimana current spending dipengaruhi oleh current resources, meningkatnya pendapatan daerah dalam hal ini PAD, DAU, dan/ atau DBH akan meningkatkan pula semua jenis alokasi anggaran belanjanya termasuk salah satunya adalah belanja modal.

Keempat, DAK tidak berperan dalam mempengaruhi alokasi anggaran belanja modal. Kesimpulan ini berseberangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Oktriniatmaja (2011) dan Wandira (2013). Adapun penelitian dengan kesimpulan yang serupa dengan hasil penelitian ini dilakukan oleh Masdjojo dan Sukartono (2009) dan Darmayasa dan Suadi (2014).

Salah satu penyebab DAK tidak dapat mempengaruhi alokasi anggaran belanja modal yaitu karena besaran alokasi DAK relatif kecil dibandingkan dengan dana perimbangan lainnya, seperti DAU dan DBH. Proporsi alokasi DAK hanya sebesar 1% terhadap total APBD. Sementara itu, jumlah belanja modal yang bersumber dari DAK hanya sebesar 7% sehingga dapat disimpulkan walaupun DAK merupakan special grant untuk pembangunan infrastruktur namun karena persentasenya yang kecil sehingga tidak menjadi faktor penentu alokasi belanja modal (Darmayasa:2014).

Kelima, belanja modal berperan dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dengan arah yang positif. Hal ini bermakna bahwa apabila terjadi kenaikan nilai belanja modal maka akan menyebabkan peningkatan pula pada capaian pertumbuhan ekonomi. Sarana dan prasarana infrastruktur ekonomi sebagai modal dasar berkembangnya aktivitas ekonomi serta yang menjadi daya tarik bagi investor merupakan hasil pengadaan aset yang direalisasikan melalui anggaran belanja modal. Oleh karena itu strategi alokasi anggaran belanja modal yang tepat sasaran untuk infrastruktur ekonomi akan mampu menjadi trigger/katalis bagi pertumbuhan ekonomi yang optimal.

Keenam, belanja modal tidak menjadi mediasi/perantara dalam hubungan antara PAD, DAU, DAK, atau DBH terhadap pertumbuhan ekonomi. Kesimpulan ini berseberangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Walidi (2009), Muis (2011), dan Afriani et al.(2012). Adapun penelitian dengan kesimpulan yang serupa dengan hasil penelitian ini dilakukan oleh Uhise (2013) dan Amnah (2014).

Pertumbuhan ekonomi terwujud dengan cara meningkatkan dan menciptakan aktivitas ekonomi baru dalam masyarakat sehingga secara makro terjadi peningkatan jumlah output barang dan/atau jasa pada daerah yang bersangkutan yang diikuti pula dengan meningkatnya jumlah uang beredar dari segi pembelanjaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Selanjutnya hal tersebut akan meningkatkan nilai PDRB dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Secara sederhana semakin besar nilai uang yang dibelanjakan oleh suatu pemerintah daerah melalui pos belanjanya baik belanja modal ataupun jenis belanja lainnya secara langsung

ataupun tidak langsung akan meningkatkan dan menciptakan aktivitas ekonomi baru dan memberikan efek multiplier yang mengarahkan pada meningkatnya PDRB dengan syarat pembelanjaan tersebut dilakukan pada wilayah daerahnya sendiri.

Pada kasus penelitian ini belanja modal tidak memediasi hubungan antara pendapatan daerah dengan pertumbuhan ekonomi dikarenakan rata-rata alokasi belanja modal pada kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Timur hanya sebatas kurang dari 15% dengan sisanya sebesar 85% lebih dialokasikan pada pos belanja selain belanja modal. Terlebih lagi berdasarkan analisa FITRA (Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran) menyatakan bahwa perilaku boros pemda yang mengurus separuh lebih anggarannya hanya untuk membiayai belanja pegawai mengantarkan mereka menuju jurang kebangkrutan. Bengkaknya belanja pegawai ini disebabkan oleh: Pertama, pemerintah telah menetapkan kenaikan gaji pegawai secara berkala sejak tahun 2007 sampai tahun 2011 antara 5-15 persen serta adanya gaji ke-13. Kedua, pembiaran terjadinya rekrutmen PNS secara terus menerus tanpa mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Ketiga, jumlah organisasi yang ada di kabupaten/ kota terlalu besar sehingga menambah beban terhadap anggaran daerah (Birokrasi Tambun, 2012).

Selain itu, berdasarkan data APBD 2010 (per 25 Juni 2010) dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, terlihat banyak daerah dengan porsi belanja pegawai di atas 50 persen. Beberapa kabupaten itu terdapat di provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Sumatera Barat (Daerah mana belanja pegawainya tertinggi, 2011).

Rendahnya porsi alokasi belanja modal disebabkan tingginya porsi belanja pegawai yang tidak terkait langsung dengan pertumbuhan ekonomi inilah yang mungkin menjadi salah satu penyebab variabel belanja modal tidak mampu menjadi mesin penggerak menuju tercapainya pertumbuhan ekonomi yang optimal meskipun nilai pendapatan daerah cukup tinggi.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh PAD, DAU, dan DBH dengan arah positif. Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh DAK tetapi dengan arah yang berlawanan atau negatif. Pengujian lebih lanjut menunjukkan bahwa belanja modal tidak menjadi mediasi/perantara hubungan antara pendapatan daerah dengan pertumbuhan ekonomi.

Pengaruh PAD, DAU, dan DBH pada penelitian ini terhadap pertumbuhan ekonomi lebih disebabkan oleh fleksibilitas variabel pendapatan daerah tersebut dalam pemanfaatannya yang diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah. Dengan keleluasaan tersebut pemerintah daerah dapat menggunakan dana dari pendapatan daerah tersebut sesuai agenda ekonominya antara lain berupa pembangunan sarana dan prasarana dasar yang berperan dalam menunjang pertumbuhan ekonomi. Berbeda dengan PAD, DAU, dan DBH, pada penelitian ini DAK berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi tetapi dengan arah negatif. DAK dalam pemanfaatannya bersifat restriktif berdasarkan peraturan menteri keuangan sehingga tidak fleksibel untuk menyesuaikan dengan agenda pemerintah daerah. Alokasi DAK sebagian besar dialokasikan untuk infrastruktur pendidikan dan kesehatan yang bisa jadi bukan menjadi prioritas pemerintah daerah yang bersangkutan pada tahun berjalan. Alokasi DAK tidak secara langsung berhubungan dengan faktor-faktor yang secara langsung mendorong pertumbuhan ekonomi seperti jalan dan jembatan. Selain itu, adanya kewajiban penyediaan dana pendamping sebesar 10% dari total nilai alokasi DAK pada APBD tentunya akan menggeser sejumlah anggaran belanja tertentu yang kemungkinan sebenarnya diperuntukkan untuk pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana yang menunjang pertumbuhan ekonomi.

Hasil penelitian selanjutnya yaitu belanja modal diketahui tidak memediasi hubungan antara pendapatan daerah dengan pertumbuhan ekonomi. Rata-rata alokasi belanja modal pada APBD di 29 kabupaten dan 9 kota di wilayah Provinsi Jawa Timur sebatas kurang dari 15% dengan sisanya sebesar 85% lebih tersebar untuk pos belanja lainnya termasuk didalamnya belanja pegawai yang berdasarkan analisa FITRA memiliki porsi di atas 50%. Rendahnya porsi alokasi belanja modal yang disebabkan tingginya porsi belanja pegawai inilah yang menjadi

salah satu penyebab variabel belanja modal tidak mampu menjadi katalis optimalnya pertumbuhan ekonomi meskipun nilai pendapatan daerah cukup tinggi.

Penelitian ini hanya menggunakan data sekunder yang terdiri dari 29 kabupaten dan 9 kota di wilayah Provinsi Jawa Timur sehingga hasil penelitian ini hanya bisa diterapkan pada provinsi yang memiliki karakteristik sama tetapi untuk provinsi lainnya dengan karakteristik yang berbeda tidak dapat diterapkan. Salah satu karakteristik Provinsi Jawa Timur selain sebagai provinsi dengan capaian PDRB tertinggi setelah DKI Jakarta, juga merupakan provinsi yang menjadi pusat ekonomi khususnya di Pulau Jawa.

Oleh karena itu, untuk penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan data penelitian pada provinsi lain yang memiliki karakteristik berbeda dengan Provinsi Jawa Timur sebagai objek penelitiannya seperti provinsi-provinsi yang berada selain di Pulau Jawa. Selain itu, mencoba alternatif variabel mediasi selain belanja modal seperti belanja pegawai dan/ atau penyertaan modal (investasi pemerintah daerah) serta penggunaan data sekunder yang lebih besar dan perpanjangan rentang tahun pengamatan diharapkan dapat lebih menggeneralisasi hasil penelitian serta memberikan kesimpulan dan hasil yang lebih komprehensif.

REFERENSI

- Adi, Priyo Hari. 2006. Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Kabupaten dan Kota se Jawa-Bali). Simposium Nasional Akuntansi 9 Padang.
- Amnah. 2014. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening di Kabupaten dan Kota Provinsi Aceh. Tesis. Universitas Sumatera Utara.
- Anasmen. 2009. Pengaruh Belanja Modal Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Barat. Tesis. Universitas Indonesia.
- Brata, Aloysius Gunadi. 2004. Komposisi Penerimaan Sektor Publik dan Pertumbuhan Ekonomi Regional. Lembaga Penelitian Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Darmayasa, I Nyoman dan Suandi. 2014. Faktor Penentu Alokasi Belanja Modal APBD Pemerintah Provinsi. SNA 17 Mataram, Lombok. Universitas Mataram.
- Dumairy. 1997. Perekonomian Indonesia. Jakarta: Erlangga.
- Halim, Abdul dan Syukriy Abdullah. 2003. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Pemerintah Daerah: Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali. Simposium Nasional Akuntansi VI
- Hariato, David dan Priyo Hari Adi. Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Perkapita. Simposium Nasional Akuntansi X Makassar.
- Hendarmin. 2012. Pengaruh Belanja Modal Pemerintah Daerah dan Investasi Swasta Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kesempatan Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat. Jurnal EKSOS. Politeknik Negeri Pontianak. http://www.academia.edu/5999908/Mekanisme_dan_Penggunaan_Dana_Alokasi_Khusus_DAK_SMERU. Lembaga Penelitian SMERU (diakses tanggal 25 Oktober 2014).
- Kusnandar dan Dodik Siswantoro. 2011. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal. Universitas Indonesia.
- Maryanti, Ulfi dan Endrawati. 2010. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi : Studi Kasus Sumatera Barat. Jurnal Akuntansi dan Manajemen. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Keluarga Pahlawan Negara.
- Masdjojo, Gregorius N. Dan Sukartono. 2009. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah serta Analisis Flypaper Effect Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2006-2008. Jurnal TEMA (Telaah Manajemen). Universitas Islam Labuhan Batu.

- Muis, Noni Hilwa. 2012. Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. Tesis. Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.
- Nurjoni. 2008. Outlook Pembangunan Infrastruktur 2008, Mengguyur Dana, Menggapai Asa. Investor Daily. <http://madani-ri.com/web/?p=167>. (Diakses 17 November 2014).
- Oktriniatmaja, Rini. 2011. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Tesis. Universitas Sebelas Maret.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.07/2009 tentang Alokasi dan Pedoman Umum Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2010.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2012.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.07/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2011.
- Prakosa, Kesit Bambang. 2004. Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Prediksi Belanja Daerah (Studi Empirik di Wilayah Provinsi Jawa Tengah dan DIY). Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia. Universitas Islam Indonesia.
- Prayitno, Hadi. 2012. Birokrasi Tambun"; 291 Daerah Habiskan Separuh Lebih APBD untuk Belanja Pegawai. Seknas FITRA. <http://seknasfitra.org/pressrelease/birokrasi-tambun-291-daerah-habiskan-separuh-lebih-apbd-untuk-belanja-pegawai/>. (Diakses 22 November 2014).
- Pujiati, Amin. 2006. Analisis Pertumbuhan Ekonomi di Karesidenan Semarang Era Desentralisasi Fiskal. Jurnal Ekonomi Pembangunan. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Rahmadi, Slamet. 2011. Keterkaitan Penerimaan Daerah dan PDRB Provinsi Jambi (Pendekatan Simultan). Jurnal Paradigma Ekonomi. Universitas Jambi.
- Santosa, Budi. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Daerah terhadap Pertumbuhan, Pengangguran, dan Kemiskinan 33 Provinsi di Indonesia. Jurnal Keuangan dan Bisnis. Universitas Trisakti Jakarta.
- Setiyawati, Anis dan Ardi Hamzah. 2007. Analisis Pengaruh PAD, DAU, DAK dan Belanja Pembangunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, dan Pengangguran. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia. Universitas Indonesia.
- Situngkir, Anggiat. 2009. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Anggaran Belanja Modal pada Pemko/Pemkab Sumatera Utara. Tesis. Universitas Sumatera Utara.
- Sodik, Jamzani. 2007. Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi Regional (Studi Kasus Data Panel di Indonesia). Jurnal Ekonomi Pembangunan. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Solimun. Analisis Variabel Moderasi dan Mediasi. Program Studi Statistikan FMIPA UB. Universitas Brawijaya.
- Tarmidzi. 2014. Gemuk di Aparatur, Kurus di Publik. FITRA Provinsi Riau. <http://fitrariau.org/gemuk-di-aparatur-kurus-di-publik/>. (Diakses 17 November 2014).
- Tuasikal, Askam. 2008. Pengaruh DAU, DAK, PAD, dan PDRB terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. Jurnal Telaah & Riset Akuntansi. Magister Pascasarjana Universitas Syiah Kuala.

- Uhise, Stepvani. 2013. Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Utara dengan Belanja Modal sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi*. Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Usman, Syaikhul *et al.* 2008. Mekanisme dan Penggunaan Dana Alokasi Khusus. Viva News. 2011. Daerah Mana Belanja Pegawainya Tertinggi? <http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/231789-daerah-mana-belanja-pegawainya-tertinggi->. (Diakses 22 November 2014)
- Walidi. 2009. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Pendapatan Perkapita, Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening. Tesis. Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.
- Wandira, Gugus Arbie. 2013. Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap pengalokasian belanja modal. *Accounting Analysis Journal*. Universitas Negeri Semarang.
- Yudhoyono, Susilo Bambang. 2011. INILAH pidato kenegaraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Gedung DPR/MPR. <https://www.facebook.com/notes/liptan6-lovers/inilah-pidato-kenegaraan-presiden-susilo-bambang-yudhoyono-sby-di-gedung-dprmpr/274076729274524>. (Diakses tanggal 20 November 2014).